



Agen Ganda Dinas Kesehatan

Erwan Hermawan

erwan.hermawan@tempo.co.id

MASIH segar di ingatan Abraham Tedjanegara obrolan dan kejadian-kejadian ketika ia bertemu ke ruangan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Ermawati pada Juli 2014. Selain tuan rumah, di ruang tamu itu ada Arfan Carlo, dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan Mulyadi, bekas muridnya yang menjabat Kepala Bagian Umum Dinas Kesehatan.

Abraham bertamu untuk membicarakan rencana pemerintah Jakarta membeli rumah sakitnya. Mulyadi adalah pejabat pembuat komitmen pembelian itu. Adapun Arfan tak jelas kedudukannya. Dien pamit ketika obrolan baru dimulai dengan alasan sedang banyak pekerjaan. "Dia berpesan agar pembelannya benar," tutur Abraham, kemarin.

Dien tak merespons kontak *Tempo* untuk mengkonfirmasi cerita Abraham. Ia juga mangkir dari undangan Panitia Khusus Pembelian RS Sumber Waras yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Panitia bersidang dua hari lalu untuk meminta penjelasan pemerintah ihwal transaksi Rp 755,7 miliar pada tahun lalu itu.

Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pembelian Sumber Waras merugikan negara karena harganya terlalu mahal. Auditor BPK membandingkannya dengan penawaran PT Ciputra Karya Utama Rp 564,4 miliar pada tahun sebelumnya.

Rupanya, di balik pembelian itu, panitia mencoba mencari keuntungan dengan berperan ganda sebagai makelar. Saat bertemu ke kantor Dinas Kesehatan itu, kata Abraham, Arfan mendominasi pembicaraan. Ia menawarkan jasa pengurusan administrasi pembelian rumah sakit, seperti balik nama, biaya notaris, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Setelah pertemuan itu, ketiganya bertemu dua kali lagi di tempat lain pada bulan yang sama. Pada pertemuan ketiga, kata Abraham, Arfan dan Mulyadi kembali membicarakan komisi. Mereka mematok angka 3 persen dari total pembelian. Mulyadi setuju membeli aset rumah sakit 3,6 hektare itu Rp 755,7 miliar.

Arfan menyatakan akan mengurus tetek-bengek pembelian itu dan menjamin kelancarannya. Ia dan Mulyadi menyarankan Abraham membebaskan biaya tersebut ke kas pemerintah Jakarta. "Mereka menyebutnya *broker fee*," kata Abraham.

Abraham menolak permintaan itu. Ia tak menghiraukan Arfan, yang mengatakan pembelian tersebut akan bermasalah jika diaudit BPK. Abraham mengatakan akan menanggung biaya administrasi. "Tapi tak satu rupiah pun saya beri mereka uang," katanya.

Mulyadi agaknya tetap menagihkan biaya tersebut ke pemerintah. Dalam audit BPK tercatat transfer Rp 800 miliar dari rekening bendahara umum ke Dinas Kesehatan. Selain harga pembelian, uang itu sudah memasukkan biaya administrasi sebesar Rp 45 miliar.

Dengan temuan tersebut, Jakarta heboh karena pemerintah dianggap sengaja membeli mahal Sumber Waras. Mendapat peluru itu, Dewan pun membentuk panitia khusus. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Koesmedi Priharto, pengganti Dien, duit biaya administrasi itu tak jadi dipakai.

Uang Rp 45 miliar, kata Koesmedi, sudah dikembalikan ke rekening pemerintah. Adapun Mulyadi mengatakan uang pemerintah yang terpakai hanya Rp 755,7 miliar, sesuai dengan harga nilai obyek jual pajak rumah sakit itu pada 2014 sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi.

Mulyadi menyangkal tuduhan pernah meminta komisi dalam pengurusan pembelian Sumber Waras. "Itu tidak benar, fitnah besar," kata dia. Setelah menguru-

si pembelian itu, Mulyadi berpindah tugas menjadi Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan.

Ia tak memungkiri jika disebut mengenal Arfan. Dalam hal pembelian Sumber Waras, kata Mulyadi, Arfan punya jasa. "Dia sudah mengurus 'sesuatu'," katanya. Sebaliknya, Arfan menyatakan tak mengenal Abraham. "Apalagi meminta uang," kata dia. ●



Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektare di Jalan Kyai Tapa, Jakarta Barat, tidak sesuai dengan prosedur. Transaksi itu, kata BPK, tak melalui pembayaran langsung, melainkan memakai uang persediaan bendahara Dinas Kesehatan.

BPK juga menilai harga lahan itu kemahalan Rp 191,3 miliar karena membandingkannya dengan tawaran PT Ciputra Karya Utama pada tahun sebelumnya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Koesmedi Priharto, pembelian Sumber Waras justru menghemat uang negara Rp 45 miliar karena komisi makelar tak jadi dibayarkan.

"Biaya administrasi ditanggung Sumber Waras," kata dia di depan Panitia Khusus Pembelian Sumber Waras DPRD Jakarta, Selasa lalu.

Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat juga menilai audit BPK yang memakai perbandingan tersebut keliru. "Ciputra menawar pada 2013, kami membeli 2014. Harga pasti beda," katanya.

● ERWAN HERMAWAN

6 Juni 2014

Pembicaraan kesepakatan pemerintah Jakarta dengan Sumber Waras tentang pembelian rumah sakit yang akan dijadikan rumah sakit kanker dan jantung.

16 Juni 2014

Dinas Kesehatan menyatakan Sumber Waras tidak bisa dibeli karena telah terikat perjanjian dengan Ciputra.

27 Juni 2014

Manajemen Sumber Waras menyatakan bersedia menjual asetnya kepada pemerintah senilai Rp 755,7 miliar.

8 Juli 2014

Pemerintah menyetujui harga itu. Pelaksana tugas Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menganggarkan pembelian dalam APBD Perubahan 2014.

November 2014

Kajian teknis pembangunan rumah sakit kanker dan jantung selesai.

22 Desember 2014

Transaksi jual-beli